

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi penduduk Indonesia ke Sabah, Malaysia, bukanlah fenomena baru yang muncul akibat kebutuhan tenaga kerja modern semata, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang. Sebelum terbentuknya negara Indonesia dan Malaysia sebagai entitas politik modern, kawasan Laut Sulawesi telah menjadi ruang interaksi ekonomi dan sosial yang menghubungkan masyarakat Sulawesi, Kalimantan, dan pantai timur Sabah. Aktivitas perdagangan maritim, pelayaran tradisional, dan hubungan kekerabatan telah menciptakan mobilitas penduduk lintas wilayah yang berlangsung selama berabad-abad.

Menurut Maunati masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan telah lama dikenal sebagai kelompok pelaut dan pedagang yang memiliki mobilitas tinggi di kawasan Asia Tenggara maritim (Maunati, 2016). Gelombang perpindahan masyarakat Bugis ke Sabah berlangsung sejak masa kolonial dan semakin meningkat setelah konflik politik di Sulawesi Selatan pada dekade 1950-an hingga 1960-an. Migrasi tersebut kemudian berkembang menjadi jaringan diaspora yang tersebar di Nunukan, Sebatik, Tawau, dan berbagai wilayah Sabah lainnya.

Migrasi masyarakat Bugis ke Sabah telah berlangsung sejak abad ke-19 dan terus berkembang karena adanya jaringan keluarga yang telah menetap lebih dahulu di Malaysia. Jaringan tersebut mempermudah proses migrasi generasi berikutnya melalui penyediaan informasi pekerjaan, tempat tinggal, serta dukungan sosial di

daerah tujuan. Keberadaan diaspora Bugis menyebabkan migrasi menjadi proses yang berkesinambungan karena calon migran memperoleh bantuan langsung dari kerabat yang telah lebih dahulu menetap di Sabah.

Selain masyarakat Bugis dari Sulawesi Selatan, arus migrasi menuju Sabah juga melibatkan masyarakat dari wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Tirtosudarmo menjelaskan bahwa masyarakat Flores dan wilayah NTT lainnya mulai bermigrasi ke Sabah dalam jumlah yang lebih besar sejak dekade 1970-an dan 1980-an (Tirtosudarmo, 2019). Migrasi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja di daerah asal serta meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan, konstruksi, dan jasa di Sabah. Kedekatan geografis antara Indonesia bagian timur dan Sabah menjadikan wilayah perbatasan Nunukan-Tawau sebagai koridor migrasi utama bagi pekerja migran Indonesia.

Fenomena migrasi tersebut semakin berkembang karena faktor ekonomi Sabah mengalami pertumbuhan pesat pada sektor perkebunan kelapa sawit, perikanan, dan konstruksi sejak tahun 1970-an sehingga membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sementara itu, banyak wilayah di Sulawesi dan NTT masih menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan formal. Kondisi tersebut menciptakan faktor pendorong (push factors) di daerah asal dan faktor penarik (pull factors) di daerah tujuan.

Nunukan dan Tawau berkembang sebagai jalur utama mobilitas pekerja migran Indonesia karena letaknya yang berdekatan dan biaya perjalanan yang relatif murah dibandingkan migrasi ke wilayah lain (Mahadi et al, 2018). Migrasi dari NTT memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan migrasi Bugis.

Jika migrasi Bugis lebih banyak didukung oleh tradisi pelayaran dan perdagangan yang telah berlangsung lama, migrasi dari NTT cenderung berkembang sebagai strategi rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Dari perspektif sejarah perbatasan, Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat penting, masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia telah lama menjalin hubungan ekonomi dan sosial yang intensif. Bahkan sebelum adanya pengawasan perbatasan modern, mobilitas masyarakat antarwilayah berlangsung secara alami melalui jalur laut tradisional.

Kondisi geopolitik kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan dan Pulau Sebatik, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terbentuknya arus migrasi menuju Sabah. Pembagian Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia sebagai warisan batas kolonial telah menciptakan ruang sosial dan ekonomi lintas batas yang sangat intensif. Kedekatan geografis dengan Tawau, hubungan historis antarmasyarakat, serta tingginya ketergantungan ekonomi terhadap Sabah menjadikan mobilitas lintas negara sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat perbatasan (Puryanti & Husain, 2011; Rudiati, 2016). Dalam konteks tersebut, Nunukan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah perbatasan negara, tetapi juga sebagai koridor migrasi yang menghubungkan masyarakat Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur dengan pasar tenaga kerja di Malaysia.

Kondisi geopolitik ini pada akhirnya membentuk lingkungan yang memungkinkan arus migrasi berlangsung secara terus-menerus melalui jaringan sosial, ekonomi, dan kekerabatan yang telah berkembang selama beberapa generasi.

Migrasi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Malaysia, khususnya Sabah, tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi daerah asal. NTT merupakan salah satu provinsi yang selama beberapa dekade menghadapi tantangan pembangunan berupa tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, keterbatasan lapangan kerja formal, produktivitas pertanian yang rendah, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan kekeringan. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat menjadikan migrasi sebagai strategi untuk mempertahankan kehidupan ekonomi rumah tangga.

Laporan Overseas Development Institute tahun 2024 menemukan bahwa di berbagai wilayah NTT, migrasi kerja ke Malaysia telah menjadi pola yang mengakar dan diterima sebagai strategi ekonomi keluarga lintas generasi (ODI, 2024). Penelitian tersebut dilakukan di daerah-daerah pengirim pekerja migran, termasuk Kupang dan wilayah lain di NTT. Hal ini menunjukkan bahwa migrasi ke Malaysia tidak lagi dipandang sebagai pilihan sementara, melainkan telah menjadi bagian dari strategi penghidupan (*livelihood strategy*) yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Kondisi ekonomi NTT yang menjadi faktor pendorong migrasi menurutnya karena terbatasnya kesempatan ekonomi di Flores dan wilayah NTT menyebabkan banyak masyarakat usia produktif mencari pekerjaan di luar daerah, terutama ke Malaysia (Allerton, 2020).

Faktor utama yang mendorong migrasi bukan hanya kemiskinan absolut, tetapi juga keterbatasan peluang mobilitas ekonomi dan pekerjaan yang mampu memberikan pendapatan memadai. Selain minimnya kesempatan kerja, struktur ekonomi NTT yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional turut memengaruhi keputusan migrasi. Banyak wilayah di NTT memiliki kondisi

geografis kering (*semi-arid region*) sehingga produktivitas pertanian sangat bergantung pada musim hujan. Ketidakpastian hasil pertanian menyebabkan pendapatan rumah tangga sering kali tidak stabil. Dalam berbagai studi pembangunan wilayah NTT, kondisi ini dikenal sebagai faktor yang mendorong masyarakat mencari sumber penghasilan alternatif melalui migrasi tenaga kerja. Oleh karena itu, bekerja di Malaysia dipandang sebagai cara memperoleh pendapatan tunai yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan lokal. Kombinasi faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan tersebut kemudian membentuk arus migrasi yang terus berlangsung dari generasi ke generasi.

Meskipun berbagai faktor sejarah, geografis, dan ekonomi telah mendorong masyarakat Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi, untuk bekerja di Malaysia, kenyataannya masih banyak calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memilih jalur non-prosedural maupun berakhir dalam status ilegal. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan konseptual. PMI nonprosedural adalah pekerja yang berangkat tidak melalui mekanisme resmi penempatan yang ditetapkan pemerintah, misalnya tidak mengikuti tahapan pelayanan, verifikasi dokumen, pelatihan, atau layanan yang disediakan melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan instansi terkait, sehingga sebagian atau seluruh dokumen pendukung keberangkatannya tidak lengkap. Sementara itu, PMI ilegal merujuk pada status pekerja yang memasuki, tinggal, atau bekerja di negara tujuan tanpa izin yang sah atau melanggar ketentuan keimigrasian negara tujuan, sehingga seseorang

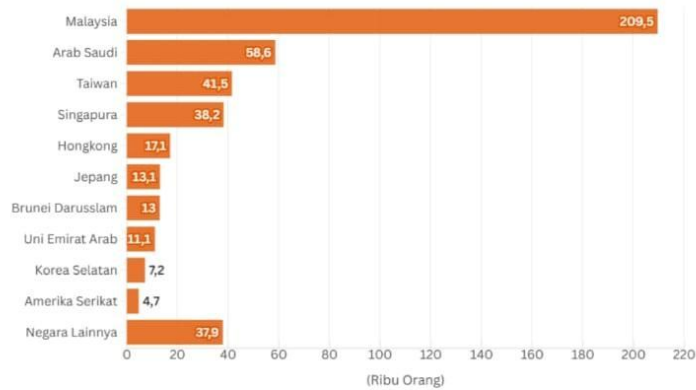
yang awalnya berangkat secara nonprosedural berpotensi menjadi pekerja ilegal ketika berada di Malaysia.

Dalam konteks pembangunan global, migrasi tenaga kerja menjadi salah satu bentuk migrasi yang paling dominan. *International Labour Organization* mencatat bahwa sekitar 169 juta dari total migran internasional merupakan pekerja migran, yang sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang dan bermigrasi ke negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (ILO, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja memiliki keterkaitan erat dengan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Negara-negara berkembang dengan tingkat pengangguran tinggi dan keterbatasan lapangan kerja menjadi wilayah asal utama, sedangkan negara-negara dengan kebutuhan tenaga kerja besar menjadi tujuan utama migrasi. Dalam perspektif ekonomi politik internasional, migrasi tenaga kerja mencerminkan hubungan yang tidak seimbang antara pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah perifer yang menjadi pemasok tenaga kerja murah.

Di kawasan Asia Tenggara, pola migrasi tenaga kerja menunjukkan hubungan yang sangat erat antara Indonesia sebagai negara pengirim dan Malaysia sebagai negara penerima. Hubungan migrasi kedua negara ini telah berlangsung sejak masa kolonial dan terus berkembang hingga saat ini. Malaysia menjadi salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia karena menawarkan peluang kerja yang lebih luas, upah yang relatif lebih tinggi, serta akses geografis yang lebih dekat dibanding negara tujuan lainnya.

Negara Tujuan Terbanyak Pekerja Migran Indonesia

(Tahun 2024)



Sumber: Badan Pusat Statistik

GoodStats

Sumber: BPS, 2024

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 negara tujuan utama orang Indonesia untuk bekerja merupakan ke Malaysia dengan jumlah PMI sebanyak 209,5 ribu orang atau mencapai 46,3%. Tingginya angka ini memperlihatkan bahwa Malaysia masih menjadi magnet utama migrasi tenaga kerja Indonesia. Namun demikian, di balik tingginya angka migrasi prosedural tersebut, terdapat realitas lain yang tidak kalah signifikan, yakni masih kuatnya arus migrasi non-prosedural dan ilegal. Fenomena ini menjadi persoalan serius dalam tata kelola migrasi Indonesia.

Data deportasi dari Malaysia menunjukkan bahwa ribuan PMI dipulangkan setiap tahun melalui wilayah Nunukan akibat pelanggaran keimigrasian, ketiadaan dokumen resmi, atau pelanggaran izin kerja. Menurut Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sepanjang tahun 2023 lebih dari 1.981 PMI dideportasi dari Malaysia melalui Nunukan, sementara pada semester pertama tahun 2024 jumlah tersebut telah melampaui 2.295 orang (BP2MI, 2024). Angka ini menunjukkan pola

yang konsisten bahwa migrasi non-prosedural masih terus berlangsung dan belum mampu ditekan secara signifikan.

Fenomena migrasi non-prosedural ini menjadi semakin kompleks karena tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial-ekonomi di daerah asal PMI. Beberapa daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan sebagian wilayah Jawa dikenal sebagai kantong utama pekerja migran Indonesia. Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik berupa tingkat kemiskinan relatif tinggi, keterbatasan lapangan kerja formal, serta ketergantungan masyarakat terhadap remitansi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTT pada Maret tahun 2024 masih berada pada angka 19,48%, dan mengalami penurunan pada September menjadi 19,02% namun masih jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 8,7% (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa migrasi bukan sekadar pilihan, melainkan sering kali menjadi strategi survival ekonomi rumah tangga.

Selain faktor ekonomi, budaya migrasi juga menjadi faktor penting dalam membentuk keputusan migrasi. Di beberapa wilayah seperti Flores dan Timor, migrasi ke Malaysia telah menjadi tradisi sosial yang diwariskan antar generasi. Migrasi dipandang sebagai simbol keberhasilan ekonomi dan mobilitas sosial. Dalam konteks ini, keputusan migrasi tidak lagi bersifat individual, tetapi dibentuk oleh ekspektasi keluarga dan komunitas. Menurut Douglas Massey, jaringan sosial migrasi memainkan peran sentral dalam mempertahankan arus migrasi karena menyediakan informasi, akses, dan dukungan sosial bagi calon migran (Massey,

1993, 448). Hal ini memperlihatkan bahwa migrasi sering kali dipelihara oleh struktur sosial yang telah mapan.

Kabupaten Nunukan memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks migrasi Indonesia-Malaysia. Sebagai wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Sabah, Malaysia, Nunukan menjadi titik transit utama bagi PMI yang akan masuk ke wilayah Malaysia maupun yang dideportasi kembali ke Indonesia. Secara geografis, jarak Nunukan dengan Tawau relatif dekat, sehingga mobilitas lintas batas menjadi lebih mudah dan intens. Wardhani dan Dugis menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di wilayah Sebatik dan Nunukan ditandai dengan hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Malaysia, baik dalam perdagangan, penggunaan mata uang ringgit, maupun akses kebutuhan pokok (Wardhani & Dugis, 2018, 61). Kedekatan geografis ini memperkuat daya tarik migrasi dan memperbesar peluang munculnya jalur non-prosedural.

Dalam praktiknya, Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi jalur transit formal, tetapi juga menjadi ruang strategis bagi berkembangnya jalur-jalur informal migrasi. Banyak PMI yang datang dari NTT, Sulawesi, NTB, dan Jawa menjadikan Nunukan sebagai “muara migrasi” sebelum memasuki Sabah. Dalam banyak kasus, keberangkatan dilakukan melalui bantuan broker atau calo yang menawarkan jalur cepat dengan biaya yang dianggap lebih murah dan proses yang lebih sederhana dibandingkan jalur resmi. Fenomena ini menunjukkan bahwa tata kelola migrasi di perbatasan memiliki karakteristik yang berbeda dengan wilayah non-perbatasan, karena dipengaruhi oleh fleksibilitas ruang sosial lintas batas.

Secara normatif, pemerintah Indonesia sebenarnya telah memperkuat kerangka perlindungan pekerja migran melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan. Dibandingkan regulasi sebelumnya, UU No. 18 Tahun 2017 memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada negara dalam menjamin hak-hak pekerja migran. Menurut Hutaauruk, regulasi ini merupakan langkah progresif dalam reformasi tata kelola migrasi Indonesia karena menempatkan perlindungan sebagai inti kebijakan migrasi (Hutaauruk, Redi, & Bakir, 2023, 9).

Dengan keberadaan aktor informal seperti broker dan jaringan migrasi ilegal masih sangat dominan. Maka broker sering kali lebih dipercaya oleh calon migran karena menawarkan solusi yang cepat dan pragmatis. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan migrasi tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh keberadaan aktor-aktor yang memfasilitasi mobilitas. Fenomena ini dapat dianalisis melalui Push-Pull Theory of Migration yang dikemukakan oleh Everett S. Lee. Lee menjelaskan bahwa migrasi dipengaruhi oleh empat elemen utama: faktor di daerah asal, faktor di daerah tujuan, hambatan antara, dan faktor personal (Lee, 1966, 50).

Penelitian ini juga menggunakan konsep Global Governance yang dikembangkan oleh James N. Rosenau yang menjelaskan bahwa governance dalam isu global tidak lagi hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga melibatkan aktor non-negara dalam suatu sistem pengaturan tanpa otoritas tunggal (Rosenau, 1992, 8).

Dalam konteks migrasi, konsep ini membantu menjelaskan adanya governance gap antara kebijakan formal negara dan praktik informal yang berlangsung di lapangan.

Jika fenomena ini terus dibiarkan, maka dampak yang ditimbulkan akan semakin serius. Migrasi non-prosedural meningkatkan kerentanan pekerja migran terhadap eksploitasi, perdagangan orang, kekerasan, pemotongan upah, hingga kriminalisasi di negara tujuan. International Organization for Migration mencatat bahwa migran non-prosedural memiliki risiko eksploitasi hampir dua kali lebih tinggi dibanding migran prosedural (IOM, 2023, 31).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada bagaimana faktor pendorong dan faktor penarik memengaruhi keputusan PMI dalam memilih jalur migrasi non-prosedural dan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya Kabupaten Nunukan. Fokus penelitian akan menggunakan indikator utama berupa: (1) faktor ekonomi, (2) faktor sosial-budaya, (3) aksesibilitas migrasi, (4) peran broker/jaringan migrasi, dan (5) efektivitas tata kelola migrasi. Indikator-indikator ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antara motivasi individu dengan struktur tata kelola yang lebih luas.

Penelitian ini menjadi penting secara akademik karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi migrasi internasional dalam perspektif Hubungan Internasional, khususnya mengenai interaksi antara faktor mikro atau keputusan individu dan faktor makro tata kelola migrasi yang membutuhkan perhatian khusus.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dirumuskanlah pertanyaan penelitian yakni bagaimana *Push-Pull Factors* memengaruhi keputusan Pekerja Migran Indonesia memilih jalur migrasi non-prosedural dan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di daerah Kabupaten Nunukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Push-Pull Factors memengaruhi keputusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam memilih jalur migrasi non-prosedural dan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor pendorong (*push factors*) dari daerah asal seperti tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, dan budaya migrasi, serta faktor-faktor penarik (*pull factors*) dari negara tujuan seperti peluang kerja yang lebih besar, upah yang lebih tinggi, kedekatan geografis, dan keberadaan jaringan sosial. Serta memahami tata kelola migrasi melalui perspektif *global governance* turut membentuk dan mempertahankan praktik migrasi non-prosedural di wilayah perbatasan. Maka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara faktor individu, struktural, dan tata kelola dalam dinamika migrasi PMI.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah di jelaskannya tujuan penelitian, bagian ini akan menguraikan manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian, baik dalam ranah akademis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini akan memperluas khazanah pengetahuan dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, khususnya kajian migrasi internasional, tata kelola perbatasan, dan global governance. Penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang ingin mendalami isu-isu seputar migrasi ilegal, perlindungan pekerja migran, serta implementasi kebijakan publik dalam konteks transnasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoretis mengenai keterkaitan antara faktor struktural (kebijakan negara), faktor kultural (tradisi migrasi turun-temurun), dan faktor sosial-ekonomi (dorongan kebutuhan ekonomi) yang membentuk dinamika migrasi di kawasan perbatasan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmiah serta menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan di bidang serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait seperti KP2MI/BP2MI dan aparat pengawas perbatasan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap realitas migrasi di lapangan, dan meningkatkan sosialisasi regulasi, memperbaiki

sistem layanan administrasi migran, serta memperkuat koordinasi antar lembaga. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pekerja migran itu sendiri, karena dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya mengikuti prosedur resmi, sekaligus membuka ruang advokasi agar perlindungan hukum dapat mencakup juga kelompok migran nonprosedural yang selama ini rentan terhadap eksploitasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan pada aspek teoritis, tetapi juga menawarkan solusi konkret bagi perbaikan tata kelola migrasi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menjaga alur penelitian tetap terarah dan mudah dipahami, penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan. Setiap bab dirancang untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan berkesinambungan, dimulai dari pemaparan fenomena migrasi pekerja migran Indonesia di wilayah perbatasan, dilanjutkan dengan landasan teori dan metodologi penelitian, kemudian pembahasan mengenai kondisi empiris di lapangan, hingga akhirnya sampai pada tahap analisis, pembahasan, dan penarikan kesimpulan.

Bab pertama menjadi landasan awal penelitian ini. Di dalamnya terdapat latar belakang yang menguraikan sejarah dan dinamika migrasi pekerja Indonesia ke Malaysia, khususnya melalui wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, serta perkembangan fenomena migrasi non-prosedural dan ilegal di Kabupaten Nunukan. Dari latar belakang tersebut, penelitian kemudian mengerucut pada pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian, disusul dengan tujuan penelitian yang hendak

dicapai serta manfaat penelitian baik dalam ranah akademis maupun praktis. Bagian ini ditutup dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang memberikan gambaran mengenai susunan penelitian dari awal hingga akhir.

Bab kedua berfungsi sebagai fondasi akademis penelitian. Pada bagian awal, bab ini memaparkan berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik migrasi pekerja migran, perlindungan pekerja migran Indonesia, migrasi non-prosedural, serta dinamika kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia. Dari kajian tersebut, penelitian ini menempatkan dirinya dalam perkembangan studi yang telah ada sekaligus menunjukkan kebaruan penelitian. Selanjutnya, bab ini menguraikan kerangka teori yang digunakan, yaitu *Push-Pull Theory of Migration* dan *Global Governance Theory*, serta menjelaskan operasionalisasi konsep dan hipotesis penelitian. Pada bagian akhir, bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang meliputi ruang lingkup penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber serta teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data yang digunakan.

Pada bab ketiga ini, peneliti mendeskripsikan kondisi empiris yang menjadi konteks penelitian. Pembahasan diawali dengan penjelasan mengenai karakteristik wilayah Kabupaten Nunukan sebagai kawasan perbatasan strategis Indonesia–Malaysia, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya mobilitas masyarakat setempat. Selanjutnya, bab ini menguraikan tata kelola migrasi yang berlaku di wilayah perbatasan beserta peran berbagai aktor formal maupun informal yang terlibat dalam proses migrasi. Pada bagian berikutnya, peneliti membahas pola migrasi pekerja migran Indonesia, faktor-faktor pendorong dan penarik migrasi,

serta berbagai hambatan dalam implementasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang memengaruhi munculnya praktik migrasi non-prosedural dan ilegal.

Bab keempat ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis dan pembahasan. Pembahasan diawali dengan analisis hubungan kausal antara implementasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan masih kuatnya praktik migrasi non-prosedural di wilayah perbatasan. Selanjutnya, bab ini menguraikan Push-Pull migrasi yang muncul dari interaksi antara regulasi, birokrasi, kebutuhan ekonomi, serta ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap pasar tenaga kerja Malaysia. Analisis kemudian dikembangkan dengan mengintegrasikan perspektif *Push-Pull Theory of Migration* dan *Global Governance Theory* untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pekerja migran memilih jalur non-prosedural dan ilegal. Pada bagian akhir, bab ini menyajikan sintesis hasil analisis mengenai interaksi faktor mikro, meso, dan makro yang membentuk fenomena migrasi ilegal, sekaligus menawarkan arah perbaikan tata kelola migrasi di wilayah perbatasan.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berfungsi sebagai rangkuman dari keseluruhan penelitian. Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, lembaga terkait, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam tata kelola migrasi pekerja migran Indonesia. Bagian ini sekaligus memberikan saran bagi penelitian

selanjutnya yang ingin mengkaji isu migrasi pekerja migran dan tata kelola perbatasan secara lebih mendalam.

